

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP PROFESIONALISME DAN  
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM SELEKSI KOMISIONER  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(Studi di KPU Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**ALLEN INDRA YUDHA**

**NPM. 1621020249**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP PROFESIONALISME DAN  
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM SELEKSI KOMISIONER  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(Studi di KPU Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**ALLEN INDRA YUDHA**

**NPM. 162102049**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dari hari ke hari semakin nyaring disuarakan. Oleh karena itu, tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas akan berakibat kepada meningkatnya kredibilitas publik kepada institusi penyelenggara pemilu beserta seluruh hasilnya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung dan para anggota Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode interview, dokumentasi dan pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam proses seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung telah menerapkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dan apabila ditinjau menurut fiqh siyasah sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik telah sesuai dengan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab, akuntabilitas), tabligh (komunikatif) dan fatonah (cerdas, profesional). Karena komisioner KPU Provinsi Lampung harus profesional dan bertanggung jawab agar dapat mengemban tugasnya dengan baik.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Allen Indra Yudha  
NPM : 1621020249  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi di KPU Provinsi Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2020

Penulis,



Allen Indra Yudha  
1621020249





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289**

**PERSETUJUAN**

**Nama :** Allen Indra Yudha  
**NPM :** 1621020249  
**Fakultas :** Syariah  
**Jurusan :** Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
**Judul Skripsi :** Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi di KPU Provinsi Lampung)

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II,**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.S.i**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi di KPU Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Allen Indra Yudha**, NPM : **1621020249**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 11 Januari 2021**.

**Tim Penguji**

**Ketua : Frenki, M.SI.**

**Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

**Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Penguji III : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)




**Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Ichairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

(سورة الاسراء: ٣٦) 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17):36, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, 2002, h. 286.



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta Bapak Indra Wilmar dan Ibu Via Yenti Mala yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Saudara-saudaraku uni Dessy Indra Permala dan abang Kent Indra Jaya yang senantiasa menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasah Syar'iyyah Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Maret 1995, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Indra Wilmar dan Ibu Via Yenti Mala. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung dari tahun 2001-2007. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Harapan Bangsa Bandar Lampung dari tahun 2011-2013. Setelah itu tahun 2013-2016 penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Harapan Bangsa Bandar Lampung. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi di KPU Provinsi Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak Erwan Bustami, S.H., M.H. selaku Ketua Komisioner KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di KPU Provinsi Lampung, dan Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Ketua Timsel Komisioner KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024, serta pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
8. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi Ayu Setiani, Salis, Yusha terima kasih atas bantuan dan arahannya selama ini.
11. Sahabat baikku Arif, Ridho, Kiki, Gustian, Dion terima kasih selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Siyasa Syar'iyah C terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir
13. Sahabat-sahabat KKN ku Rifa'i, Selgi, Desti, Mesy, Hanif, Ebid, Indri, Wulan, Aang, Edwar dan Avira.
14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatas kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 15 Desember 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian .....	12

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	18
B. Konsep Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Islam .....	22
C. Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Sejarah Ketatanegaraan Islam .....	34
D. Komisi Pemilihan Umum .....	47
E. Tinjauan Pustaka .....	51

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung .....	54
2. Visi dan Misi KPU Provinsi Lampung .....	55
3. Struktur Keanggotaan di KPU Provinsi Lampung .....	56
4. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Lampung .....	58
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Mekanisme Pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi Lampung .....	60
2. Mekanisme Seleksi Komisioner KPU Provinsi Lampung .....	69

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Seleksi Komisioner KPU Provinsi Lampung ..... 82
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Seleksi Komisioner KPU Provinsi Lampung ..... 87

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 91
- B. Rekomendasi..... 92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Keanggotaan Komisioner KPU Provinsi Lampung .....	56
2. Struktur Sekretariat KPU Provinsi Lampung .....	57



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulisan skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP PROFESIONALISME DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM SELEKSI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi di KPU Provinsi Lampung)**. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Fiqh Siyasah

Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

#### 2. Prinsip Profesionalisme

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.<sup>3</sup> Sedangkan profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

<sup>3</sup> Prinsip” (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip> (9 Maret 2020).

<sup>4</sup>Faisal Akbar Sagala, “Profesionalisme Etika Profesi” (On-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/faisalazharsagala/593ff03d599373c208d05ef6/profesionalisme-etika-profesi?page=all> (9 Maret 2020).

Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.

Prinsip Profesionalisme dalam hal ini yaitu KPU Provinsi dalam memilih seorang Komisioner KPU harus berasal dari orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi. Mereka adalah karyawan tetap lembaga penyelenggara pemilu, yang mengelola dan mempermudah proses pelaksanaan pemilu.

### **3. Akuntabilitas Publik**

Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

### **4. Komisioner Komisi Pemilihan Umum**

Orang-orang yang telah ditugaskan oleh pemerintah dalam menjalankan komisi dan mendapatkan imbalan jasa di lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.<sup>5</sup>

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi di KPU Provinsi Lampung) adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum, pasal 1.



terhadap masalah prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner pada KPU Provinsi Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

### **1. Alasan Memilih Judul Secara Objektif**

Karena ingin mengetahui apakah seleksi komisioner KPU di KPU Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dan bagaimana jika ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.

### **2. Alasan Memilih Judul Secara Subjektif**

Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran lembaga negara tambahan independen (*the auxiliary state agency*) pasca perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehidupan politik kenegaraan yang sudah sangat kompleks. Sehingga, pemisahan kekuasaan negara (*trias politica*) yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif sudah tidak memadai lagi.<sup>6</sup> Lembaga negara tambahan independen sendiri mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan lembaga negara utama (*the main state*).<sup>7</sup>

Tujuan dari kehadiran lembaga negara tambahan independen ialah dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Salah satu dari lembaga negara tambahan independen di Indonesia saat ini ialah KPU. Adanya KPU dalam struktur lembaga negara tambahan, karena pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalaman tujuh kali pemilu pada Orde Baru.

Komitmen bangsa Indonesia untuk membangun pemilu yang demokratis dapat dilihat dari Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2001 dengan memasukkan ketentuan tentang pemilu dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana kemudian tercantum dalam BAB VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan didasarkan pada asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas tersebut merupakan bukti dilakukannya reformasi konstitusi, reformasi konstitusi merupakan bagian dari

---

<sup>6</sup> Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2007), h. 127.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 178.

(*law reform*) yang telah mengubah sistem ketatanegaraan di Indonesia secara mendasar.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk kepentingan pemerintah.

Selama melaksanakan kegiatan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dituntut bertindak sedemikian rupa sehingga pemilu benar-benar dapat berlangsung secara bebas dan adil (*free and fair election*). Berikut adalah beberapa prinsip yang ditekankan IDEA (*Internatonal Institute Democracy and Electoral Assistance*) atas lembaga penyelenggara pemilu demi mencapai pemilu yang bebas dan adil:<sup>9</sup>

1. Independen dan Ketidakberpihakan

Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik.

---

<sup>8</sup> M. Laica Marzuki, *Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2008), h. 73.

<sup>9</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 266.



## 2. Efisiensi dan Keefektifan

Efisiensi dan keefektifan tergantung beberapa faktor, termasuk profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu, serta melatih orang-orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pemilu.

## 3. Profesionalisme

Pemilu harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi. Mereka adalah karyawan tetap lembaga penyelenggara pemilu, yang mengelola dan mempermudah proses pelaksanaan pemilu.

## 4. Keputusan yang Tidak Berpihak dan Cepat

Undang-undang membuat ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses dan memutuskan keluhan-keluhan pemilu dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan para pengelola pemilu harus mampu berpikir dan bertindak cepat dan tidak memihak.

## 5. Transparansi

Lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap terbuka terhadap kelompok-kelompok tersebut, komunikasi dan kerjasama perlu dilakukan guna menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu.

KPU dalam hal ini sebagai suatu lembaga negara yang mengurus pemilu dinilai belum mampu untuk menangani persoalan dan permasalahan yang ada. Banyaknya perubahan kerangka hukum dinilai belum memberi hasil maksimal sebab dalam tubuh KPU sendiri masih banyak terjadi permasalahan, seperti banyak panitia penyelenggara pemilihan yang masih

meyandang atribut partai, dan kisruh dalam memutuskan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lemahnya pengawasan administrasi dalam tubuh KPU sendiri yang kemudian memicu konflik dan gangguan keamanan saat penyelenggaraan pemilu.

Revisi peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilu yang pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas pemilu dirasa belum mampu menjawab permasalahan yang ada, terutama mengenai penyelenggaraan pemilu khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksinya. Seperti pada permasalahan yang terjadi pada anggota beberapa KPU yang kerap kali bermain dengan peserta pemilu sehingga netralitas anggota Komisi Pemilihan Umum patut dipertanyakan, seperti pada kasus di bawah ini:<sup>10</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu ditangkap saat akan terbang ke Bangka Belitung. Selain Wahyu, KPK juga mencokok tiga orang lainnya. Salah satunya diduga adalah caleg PDIP Harun Masiku. Dua orang lainnya berinisial D dan S. Seorang sumber mengatakan suap ini terkait dengan posisi pergantian antar waktu (PAW) di DPR. Harun diduga melobi Wahyu agar ia bias duduk di kursi Senayan. Harun adalah calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia maju dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I nomor urut 6. Dapil Sumatera Selatan I ini meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi

---

<sup>10</sup> Dimas Tangguh S, "Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), h. 2.

Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Harun tak terpilih menjadi anggota DPR dalam Pileg 2019. Adapun yang ditetapkan oleh KPU adalah Riezky Aprilia, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dalam rapat pleno KPU 31 Agustus 2019, PDIP sempat meminta Komisi Pemilihan Umum mencoret Riezky dari daftar anggota DPR terpilih. Partai banteng mengajukan nama Harun. Namun permintaan ini ditolak oleh KPU.<sup>11</sup>

Salah satu bagian penting dari tahapan pemilu terkait organisasi penyelenggara pemilu adalah rekrutmen anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Postur, sosok, kinerja dan kualitas aparatur penyelenggara pemilu selama lima tahun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan sangat ditentukan oleh kualitas rekrutmennya. Oleh karena itu, salah satu elemen yang mesti dicermati dengan serius dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemilu adalah rekrutmen anggota KPU kab/kota. Tahapan seleksi sebagai bagian dari rekrutmen aparatur penyelenggara pemilu menarik perhatian banyak kalangan karena salah satunya terkait dengan dugaan rendahnya tingkat integritas anggota KPU di beberapa daerah selama ini. Salah satu indikatornya adalah semakin bertambahnya perangkat penyelenggara pemilu di berbagai daerah yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tuntutan dan ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dari hari ke hari semakin nyaring disuarakan. Oleh karena itu, tampilnya sosok penyelenggara pemilu yang profesional dan

---

<sup>11</sup> Nilai Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan Sekitar Rp. 400 Juta” (On-line), tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1292866/nilai-suap-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-sekitar-rp-400-juta> (9 Maret 2020).

berintegritas akan berakibat kepada meningkatnya kredibilitas publik kepada institusi penyelenggara pemilu beserta seluruh hasilnya. Dengan kata lain, untuk semakin berbobotnya kadar demokrasi, maka salah satu penopang utamanya adalah kredibilitas KPU kabupaten/kota sebagai subordinat dari KPU RI dan KPU Provinsi. Sosok anggota KPU yang berkualitas dan berkapabilitas tentunya akan dihasilkan melalui proses rekrutmen yang berkualitas pula. Dalam hal ini kinerja tim seleksi selanjutnya disebut timsel sebagai ujung tombak dalam proses rekrutmen anggota KPU kab/kota sangat menentukan dihasilkannya anggota KPU kab/kota seperti yang diharapkan masyarakat.

Menurut penjelasan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, timsel rekrutmen Anggota KPU kab/kota dibentuk oleh KPU Provinsi untuk menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota. Timsel tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, professional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Penetapan timsel anggota KPU kab/kota merupakan kewenangan mutlak KPU Provinsi.<sup>12</sup>

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah, yang mengatur dengan baik bumi dan seisinya. Pesan-pesan sangat

---

<sup>12</sup> Septrianingsih, "Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Dan Lampung Barat Tahun 2014". (Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 6.



mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun. Akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme.

Dari uraian diatas membuat penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana aturan seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Tim Seleksi dalam menentukan hasil akhir proses seleksi tersebut. Apakah sudah terpenuhinya prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam proses seleksi maupun dari kriteria calon komisioner KPU Provinsi Lampung tersebut.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dan seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung ?

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis: diharapkan penelitian ini untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dan seleksi komisioner komisi pemilihan umum Provinsi Lampung, dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis: diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner KPU Provinsi

Lampung, memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kaneh kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>13</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian dengan

---

<sup>13</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinpresentasikan kemudian disimpulkan.<sup>14</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Terdiri dari Komisioner KPU Lampung yang berjumlah 7 orang dan Tim Seleksi Calon Anggota Komisioner KPU Lampung Periode 2019-2024 berjumlah 5 orang.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti. penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Komisioner KPU yang berjumlah 4 orang yaitu Bapak Erwan Bustami, S.H., M.H. (Ketua Komisioner KPU Provinsi Lampung), Bapak Antoniyus, SIP. (Anggota Komisioner KPU Provinsi

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 105.

<sup>15</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.42.

Lampung), Bapak Ali Sidiq, S.Sos., M.IP. (Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung), dan Bapak M. Tio Aliansyah, S.H., M.H. (Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung).

- 2) Tim Seleksi Calon Anggota Komisioner KPU Lampung Periode 2019-2024 yang berjumlah 4 orang yaitu Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H (Ketua Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024), dan anggota Timsel yaitu Bapak Dr. Tuntun Sinaga, M.Hum., Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., Bapak Dr. Hertanto, M.Si.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*).<sup>16</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di KPU Provinsi Lampung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>17</sup>. Sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir,

---

<sup>16</sup> J Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 21.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1994), h. 11.



hadist, buku-buku fiqh siyasah, dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini digunakan agar lebih mudah untuk mencapai tujuan.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.<sup>18</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah, dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.
- b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode Kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat Deskriptif Kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

komisi pemilihan umum. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995, h. 32.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>21</sup> Fiqh juga dapat disimpulkan sebagai pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kata *siyasah* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, dan memerintah. Menurut para ahli, *siyasah* memiliki beberapa arti, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Ibnu Manzhur, beliau berpendapat bahwa *siyasah* berarti mengatur sesuai peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

---

<sup>21</sup> Mujaar Ibnu Syarif, Khamami Zhada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.3-4.

- b. Abdul Wahab Khalaf, menyatakan bahwa *siyasah* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.
- c. Abdur Rahman Taj, mendefinisikan *siyasah* merupakan hukum yang mengatur kepentingan seluruh umat agar sejalan dengan syariat, walaupun tidak bersumber dari ayat Al-Qur'an dan/atau Sunnah.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah* adalah mengatur atau mengurus kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang bertujuan membimbing mereka untuk mencapai kemaslahatan umat dari kemudharatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk hukum Islam mengenai peraturan dan kebijaksanaan untuk kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam bernegara.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al Mawardi dalam

---

<sup>23</sup> Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Dar al-Ta'lif :Mishr, 1953), h.10.



kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:<sup>24</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadhaiyyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:<sup>25</sup>

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Internasional)

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (Politik Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Maliyah* (Politik Keuangan Negara Atau Moneter)

---

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.tp).

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,.....h.13.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:<sup>26</sup>

- a. Politik Pembuatan Perundang-Undangan
- b. Politik Hukum
- c. Politik Peradilan
- d. Politik Moneter/Ekonomi
- e. Politik Administrasi
- f. Politik Hubungan Internasional
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan
- h. Politik Peperangan<sup>27</sup>

Dari beberapa ruang lingkup fiqh siyasah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

---

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 30.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*, .....h. 14.

c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*).

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>28</sup>

## B. Konsep Profesionalisme Dan Akuntabilitas Dalam Islam

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah, yang mengatur dengan baik bumi dan seisinya. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun.

Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam mempunyai kestabilan dan ketetapan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam struktur ajaran-ajarannya yang berbentuk perintah dan larangan. Agama memberi petunjuk bagaimana moral (etika, akhlak) itu dijalankan. Agama lah yang memberikan hukum-hukum moral dan karenanya agama lah yang memberikan sanksi yang terakhir dari semua tindakan moral.<sup>29</sup>

Secara bahasa, istilah profesional berasal dari kata profesi dalam bahasa arab disebut dengan ( الحرفة atau الاحتراف ). Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Dalam bahasa Latin, profesi disebut dengan “*proffesio*” yaitu sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>29</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.12 No.1, 2015, h.659.

seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik.<sup>30</sup> Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau jabatan tertentu yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Sehingga dari definisi tersebut, sebuah profesi harus memiliki 2 hal sekaligus, yaitu ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya dan tanggung jawab (*responsibility*) atas keputusan yang dibuatnya.<sup>31</sup> Sedangkan profesional atau dalam bahasa arab disebut dengan محترف atau احترافي yang bermakna orang yang mempunyai sifat keprofesionalan (الاحترافية الصفة) yang digunakan dalam pekerjaannya secara penuh.<sup>32</sup>

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku seseorang yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik.

---

<sup>30</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>32</sup> Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy, Asmak Ab. Rahman, Mohd Izani bin Mohd Zain, Pengukuhan Nilai Dan Profesionalisme Di Kalangan Penjawat Awam Ke Arah Efektif Governan Di Malaysia. *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 3, 2009, h. 559-592.

## 1. Dasar Hukum Bertindak Profesionalisme Dalam Islam

Dalam al-Qur'an atau hadist ada beberapa ayat atau hadis yang menunjukkan tentang pentingnya bahkan keharusan untuk bertindak profesionalisme, diantaranya:

### a. Surah An-Nisa Ayat 58

Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>33</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat kata ahli yang merujuk kepada ahli yang bermakna *expert profesional*. Jadi orang muslim dilarang menyerahkan amanat, jabatan atau pekerjaan kepada yang tidak profesional. Hal ini artinya menjadi muslim berarti harus menjadi profesional di bidangnya.

### b. Surah Al-Israa' ayat 36

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (سورة الاسراء: ٣٦)

<sup>33</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):59, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002, h. 88.



Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.<sup>34</sup>

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa bagi seorang muslim dilarang untuk mengikuti atau melakukan sesuatu yang ia tidak memahami atau tidak mempunyai ilmu terhadapnya. Sebagaimana dalam karakteristik profesi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu bahwa sebuah profesi harus dilakukan dengan berbagai ilmu yang memadai, maka secara implisit ayat ini juga mengajak kepada kaum muslimin untuk selalu menerapkan sikap profesional di dalam setiap pekerjaannya.

c. Hadis Nabi tentang menyerahkan urusan kepada ahlinya

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW pernah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Alidari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairahradhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; "bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17):36, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002, h. 286.

<sup>35</sup> Al Bukhari, *al Jami'ah al Shahih al - Mukhtashar* Jilid I, hlm.33

Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa apabila sebuah pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya maka yang terjadi adalah sebuah kehancuran. Jika ditinjau dari kriteria profesionalisme, maka hadits ini secara tegas menunjuk akan pentingnya profesionalisme dalam sebuah pekerjaan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Syaiful Sagala bahwa sebuah profesi harus memiliki 2 hal sekaligus, yaitu ahli (*expert*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>36</sup>

## 2. Nilai-Nilai Islam yang Mendasari Profesionalisme

Jika digali secara mendalam, ajaran Islam merupakan ajaran yang mengajarkan banyak sekali nilai-nilai profesional agar menjadi umat terbaik. Islam telah mengajarkan banyak sekali nilai agar setiap umatnya menjadi khalifah yang mampu mengemban tugas sebagaimana tujuan diciptakannya manusia. Nilai-nilai yang mendasari untuk bersikap profesionalisme tersebut antara lain:

### a. Nilai yang Menjadi Sifat Wajib Bagi Rasul, yaitu Sidik, Amanah, Tabligh, dan Fatonah.

Akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat pada pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional .....*, h. 1.

### 1) Sifat Kejujuran (*shiddiq*)

Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan sifat ini pula yang selalu di ajarkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan sunah Nabi. Kegiatan yang dikembangkan di dunia organisasi, perusahaan dan lembaga modern saat ini sangat ditentukan oleh kejujuran. Begitu juga tegaknya negara sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korup, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat, dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali.<sup>37</sup>

### 2) Sifat Tanggung Jawab (*amanah*)

Sikap bertanggung-jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan, organisasi, lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mu'minuun ayat 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ (سورة المؤمنون : ٨)

---

<sup>37</sup> Prof. Dr. Izomiddin, M.A., *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 68.

Artinya: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.<sup>38</sup>

### 3) Sifat Komunikatif (*tabligh*)

Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan di akses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

### 4) Sifat Cerdas (*fathanah*)

Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematika yang ada di lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.

---

<sup>38</sup> Al-Qur'an Surah Al-Mu'minuun (23) : 08, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, 2002, h. 469.

**b. Nilai-Nilai Lain yang Dapat Mendasari Pengembangan Profesionalisme**

Disamping itu, masih terdapat pula nilai-nilai Islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme, yaitu:

**1) Bersikap Positif Dan Berpikir Positif (*Husnuzh Zhan*)**

Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berpikir positif mendorong seseorang untuk berpikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. *Husnuzh zhan* tersebut, tidak saja ditujukan kepada sesama kawan dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap dan berpikir positif kepada Allah SWT. Dengan pemikiran tersebut, seseorang akan lebih bersikap objektif dan optimistik. Apabila ia berhasil dalam usahanya tidak menjadi sombong dan lupa diri, dan apabila gagal tidak mudah putus asa, dan menyalahkan orang lain. Sukses dan gagal merupakan pelajaran yang harus diambil untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan selalu bertawakal kepada Allah SWT.

**2) Memperbanyak *Silaturahmi***

Dalam Islam kebiasaan *silaturrahim* merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Namun dalam dunia profesi, *silaturahmi* sering dijumpai dalam bentuk tradisi lobi. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar.



### 3) Disiplin Waktu Dan Menepati Janji

Begitu pentingnya disiplin waktu, Al-Qur'an menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia dalam surat al-Ashr, yang diawali dengan sumpah "*Demi Waktu*". Begitu juga menepati janji, Al-Qur'an menegaskan hal tersebut dalam ayat pertama al-Maidah, sebelum memasuki pesan-pesan penting lainnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ ﴿١﴾ (سورة المائدة : ١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>39</sup>

### 4) Bertindak efektif dan efisien

Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros dan memenuhi sasaran, juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Islam sangat menganjurkan sikap efektif dan efisien.

<sup>39</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (05) : 01, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, 2002.h. 107.

### 5) Memberikan Upah Secara Tepat Dan Cepat

Ini sesuai dengan sabda Nabi, yang mengatakan berikan upah kadarnya, akan mendorong seseorang pekerja atau pegawai dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Sementara apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malas karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak dihargai secara memadai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan arti penting amal dan kerja. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai.
2. Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian.
3. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang shalih. Sehingga makna amal shalih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu dihadapan Allah maupun dihadapan manusia rekanan kerjanya.
4. Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan masyarakatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.
5. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.
6. Pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkannya.

Secara ideal, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesionalisme, baik dalam kerja untuk orientasi duniawi maupun ukhrawi. Amal perbuatan yang ditunjukkan untuk kehidupan dunia harus dilakukan seoptimal mungkin (sebagai amal shalih), begitu juga amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka profesionalisme adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula.<sup>40</sup>

Sementara itu akuntabilitas publik menurut pandangan Islam yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atau pemimpin kepada masyarakat (umat). *Accountability* atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

(سورة الزلزلة: ٨- ٧)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Zuhdi, M. Najmuddin, *Ber Islam : Menuju Keshalehan Individual Dan Sosial*, (Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2004), h. 12.

<sup>41</sup> Al-Qur'an Surah Al-Zalzalah (99): 7-8, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002, h. 600.

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري مسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : “Setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>42</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanah oleh Allah swt untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt. Dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena ketidakadilannya, misalnya, ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah swt kelak di akhirat. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super yang bebas berbuat dan

<sup>42</sup> Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn, *Syarh Riyāḍ aš-Šāliḥīn* (Riyāḍ: Dār al-Waṭan Linnasyr, 1425J), Jil III, h. 626.

memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya, ia harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Menurut Imam S. Tunggal dan Amin S. Tunggal, akuntabilitas merupakan penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners, board of director, shareholders*, dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, *traccable, reasonable*).<sup>43</sup> Jadi dapat dipahami bahwa akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan tersebut.

### C. Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Sejarah Ketatanegaraan Islam

Sejarah Islam sendiri telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Rasulullah, para Sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam mencari pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad SAW selain Rasulullah, juga sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat. Persoalan pertama yang muncul kepermukaan setelah Nabi wafat adalah persoalan suksesi. Pentingnya persoalan pemimpin ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam. Allah telah

---

<sup>43</sup> Imam S.Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance GCG*, (Jakarta: Havarindo, 2002) h. 7.

memberitahukan kepada manusia, tentang pentingnya peran pemimpin dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>44</sup>

Sesudah Nabi Muhammad wafat, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang diangkat menjadi sebagai pemimpin. Hal ini mengakibatkan terjadinya perdebatan yang sangat tajam, perpecahan, serta peperangan politik berdarah dalam sejarah Islam. Tidak adanya petunjuk operasional dan lengkap tentang *khilafah* atau kepemimpinan dalam Islam, mengisyaratkan bahwa masalah kepemimpinan merupakan personal budaya manusia yang akan berkembang terus, bersamaan dengan perkembangan pikiran manusia dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak mencantumkan masalah kepemimpinan (*khilafah*) secara eksplisit.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):59, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002, h. 88.

<sup>45</sup> Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2002), h.101.



Dalam hal syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (*ulil amri*) dengan tujuh syarat. Ketujuh syarat-syarat itu lebih jelasnya sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum
3. Memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan bertindak.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, yang berdasarkan nash dan ijma'.

Dalam hal ini al-Mawardi merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بَعْضَادَةَ الْبَابِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَجُلًا وَإِذَا

---

<sup>46</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Cet.2* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 11.

حَكُمُوا عَدْلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (رواه أحمد)

Artinya: Waki' menceritakan kepada kami (berkata) al-A'masy menceritakan kepada kami (yang berasal) dari Sahl Abi al-Asad (yang bersumber) dari Bukair al-Jazari (yang berasal) dari anas berkata : Kami (ketika) berada di rumah salah seorang sahabat Anshar, Nabi saw datang hingga berhenti kemudian memegang tiang pintu lalu bersabda : "Para imam (pemimpin) adalah dari Quraisy, Mereka memiliki hak atas kamu, dan kamu memiliki hal yang sama. Ketika kamu minta belas kasih mereka memberi belas kasih. Ketika mereka memerintah, mereka adil, dan ketika mereka berjanji, mereka menepati. Barang siapa dari mereka yang tidak berbuat demikian maka laknat Allah dan Malaikat dan seluruh manusia untuk dia."<sup>47</sup>

Sistem pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikategorikan ke dalam dua pola, yaitu: pengangkatan berdasarkan *nash* atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan (secara musyawarah). Pola pertama, dipegang oleh kaum syiah. Menurut kaum syiah, pemimpin harus diangkat berdasarkan *nash* atau wasiat. Sedangkan pola kedua dianut kaum Sunni, dimana pengangkatan seorang pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang lazim disebut dengan syura. Alasannya adalah *pertama*, karena tidak adanya *nash* yang pasti (*qath'i*) tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat Islam. *Kedua*, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura*.<sup>48</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syuura ayat 38 :

<sup>47</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h.39.

<sup>48</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 228.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(سورة الشورى: ٣٨)

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>49</sup>

Lebih rinci Abu Zahroh dalam metode makna menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara: *pertama*, melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa ada pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang. *Kedua*, pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya. *Ketiga*, pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang (tim formatur), yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.<sup>50</sup>

### 1. Mekanisme Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq r.a.

Setelah wafatnya Rasulullah Saw, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problema yang berat tentang kepemimpinan, karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pimpinan umat. Waktu setelah wafatnya Rasulullah SAW tersebut menjadikan momentum umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena para sahabat sama sekali tidak siap kehilangan beliau baik sebagai pemimpin, sahabat, maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai.

<sup>49</sup> Al-Qur'an Surah Asy-syuura (42) : 38, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, 2002, h.488.

<sup>50</sup> A. DJazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.

Sehingga sebelum Jenazah Rasulullah SAW dimakamkan, umat Islam terlebih dahulu mengurus permasalahan terkait kekosongan pemimpin tersebut, sehingga hal ini membuat putri tunggal Rasulullah SAW Sayyidah Fatimah marah,<sup>51</sup> karena pada waktu itu ada golongan sahabat dari Anshar yang berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan golongan Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Saw., ia adalah Sa'ad bin Ubadah tokoh terkemuka Suku Khazraj.<sup>52</sup>

Pada waktu Saad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah ia menyatakan bahwa kaum Anshar-lah yang pantas memimpin kaum muslimin. Ia mengemukakan demikian sambil berargumen bahwa golongan Ansharlah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Tentu saja gagasan dan wacana ini disetujui oleh para sahabat dari golongan Anshar. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Anshar tersebut, mereka segera menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang Muhajirin

---

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 214.

<sup>52</sup> *Ibid*, h.214.

datang di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Anshar nyaris bersepakat untuk untuk mengangkat dan membaiai Saad bin Ubadah menjadi Khalifah. Karena pada saat tersebut para tokoh Muhajirin juga datang maka mereka juga diajak untuk mengangkat dan membaiai Saad bin Ubadah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas membaiai Saad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Anshar bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk Agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Makkah. Dengan usulan Abu Bakar ra. Golongan Anshar tidak dapat membantah usulannya.<sup>53</sup>

Kaum Anshar menyadari dan ingat, bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya dari Makkah mengajak masuk Islam, bukankah di antara mereka sering terlibat perang saudara yang berlarut-larut. Dan dari sisi kualitas tentu saja para sahabat Muhajirin adalah manusia-manusia terbaik dan yang pantas menggantikan kedudukan Nabi dan menjadi khalifah untuk memimpin kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan Abu Bakar menunjuk dua orang Muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Demikian kata Abu Bakar kepada

---

<sup>53</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin...*, h. 215.

kaum Anshar sembari menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun sebelum kaum Anshar merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas Umar mengayungkan tanganya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiahnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah. Dan akhirnya diikuti kaum Anshar untuk membaiaht Abu Bakar Kecuali Saad bin Ubadah.

Lalu pada esok harinya, baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat muslim di Madinah dan dalam pembaiatannya tersebut, Abu Bakar berpidato sebagai berikut:

“Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantu-lah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya.”<sup>54</sup>

## **2. Mekanisme Pengangkatan Umar Bin Khatab ra**

Berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang, hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Sementara Umar Bin Khathab diangkat melalui penunjukan yang

---

<sup>54</sup> Abd Al-Wahidal-Najjar, *Al-Khulafaur Rasyidin* (Beirut :Dar Al Kutub-Ilmiah, 1990), h.35



dilakukan khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasinya akan menjadi keruh karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada diantara mereka yang membuat negara menjadi tidak stabil, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terhambat.<sup>55</sup>

Pada Saat Khalifah Abu Bakar merasa dekat dengan ajalnya, Ia menunjuk Umar Bin Khatab untuk menggantinya, namun sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Afan, Asid bin Hudhair al-Anshari, Said bin Ziad dan Sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Anshar untuk dimintai penilaian dan pertimbangan dan akhirnya mereka menyetujui.

### **3. Mekanisme Pemilihan Usman Bin Affan r.a**

Ketika Umar sedang sakit akibat dari tikaman seorang budak Persia yang bernama Fairuz yang lebih dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah, sekelompok sahabat datang menjenguknya dan sekaligus menanyakan dan mendiskusikan penggantinya Dia sebagai khalifah, pertanyaan dari para sahabat ini tidak mendapatkan jawaban pasti dari Umar bin Khattab. sesudah itu, sahabat beranjak meninggalkan Khalifah Umar bin Khattab.

---

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar*,...h.218

Para sahabat Rasulullah merasa takut andai Umar wafat tanpa meninggalkan pesan tentang penggantinya. Oleh karena itu, mereka mendatangnya lagi untuk mendesak Umar bin Khattab menentukan penggantinya. Di tempat tidurnya, Umar mengambil keputusan dengan menunjuk badan musyawarah yang terdiri dari orang-orang yang diridhoi dan dijanjikan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Saad bin Waqah, Adurahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah bin Umar. Untuk memilih seorang khalifah diantara mereka.<sup>56</sup>

Namun khusus untuk Abdullah bin Umar tidak dicalonkan apalagi dipilih berdasarkan wasiat khalifah Umar. Adapun kriteria pemilihan telah ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab yaitu : Khalifah yang di pilih adalah dari anggota Syura kecuali Abdullah bin Umar yang tidak punya hak pilih dan bertindak sebagai penasihat. Bilamana suara dari anggota tim sama hendaknya keputusan diserahkan kepada Abdullah bin Umar sebagai anggota tim tersebut. Jika keputusan Abdullah bin Umar tidak disetujui oleh anggota mengikuti keputusan yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Bila ada anggota tim yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan maka anggota tersebut harus dipenggal kepalanya. Bila dua calon mendapatkan dukungan yang sama maka calon yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf yang dianggap menang. Apabila seorang telah terpilih dan minoritas (satu atau dua) tidak mau mengikutinya maka kepala

---

<sup>56</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999) h.138.

mereka harus dipenggal. Jadwal pelaksanaan musyawarah selama tiga hari ke empat sudah ada pemimpin.<sup>57</sup>

Tatkala Umar wafat, berkumpul orang-orang yang dipilihnya menjadi tim formatur dikepalai oleh Abdurrahman bin Auf di dalam salah satu rumah kepunyaan mereka. Tiga hari lamanya musyawarah yang amat penting itu, dan sudah tiga hari rupanya belum juga dapat diputuskan karena sejak awal jalannya pertemuan itu sangat alot, maka Abdurrahman bin Auf berusaha memperlancar dengan himbauan agar sebaiknya mereka dengan sukarela mengundurkan diri dan menyerah kepada orang yang lebih pantas (memenuhi syarat) untuk dipilih sebagai khalifah. himbauan ini tidak berhasil, tidak ada satupun yang mau mengundurkan diri, kemudian Abdurrahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri tetapi tidak ada seorang pun dari empat sahabat Nabi yang mengikutinya.

Dalam kondisi macet itu, Abdurrahman bin Auf berinisiatif melakukan musyawarah dengan sahabat dan tokoh-tokoh masyarakat selain yang termasuk dalam anggota badan musyawarah, dan suara terbelah menjadi dua kubu yaitu pendukung Ali dan pendukung Utsman. Pada pertemuan berikutnya, Abdurrahman bin Auf menempuh cara dengan menanyakan masing-masing anggota formatur dan di dapatlah skor suara tiga banding satu, dimana Zubair, dan Ali mendukung Utsman, sedangkan Utsman mendukung Ali.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h.139.

Meskipun suara terbanyak dari anggota formatur jatuh pada Utsman, namun Abdurrahman tidak serta merta membai'at Utsman. Tetapi pada subuh hari sesudah semalaman ia berkeliling memantau pendapat masyarakat, ia berdiri setelah kaum Muslimin memenuhi mesjid dan menyampaikan pengantar tentang pelaksanaan pemilihan khalifah. Di sini terlihat kembali persaingan dua kubu yaitu kubu Ali dan kubu Utsman.

Pada saat itu Abdurrahman menunjukkan keahliannya menghadapi masalah yang sulit ini. Dia memanggil Ali dan Utsman secara terpisah untuk dimintai kesanggupannya bertindak berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya serta berdasarkan langkah-langkah yang diambil oleh dua khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Thalib bertindak sesuai dengan pengetahuan dengan kekuatan yang ada pada dirinya, sedangkan Utsman bin Affan menyanggupinya, sehingga Abdurrahman mengucapkan bai'atnya dan diikuti oleh orang banyak menyatakan bai'at, termasuk juga Ali pada akhirnya juga menyatakan bai'atnya kepada Utsman bin Affan. Orang keenam tim formatur, Thalhah bin Ubaidillah tiba di Madinah setelah pemilihan itu berakhir. Dia juga menyatakan sumpah setia kepada Utsman bin Affan.<sup>58</sup>

Mencermati proses pemilihan tersebut, nampak dengan jelas upaya pemilihan khalifah dilakukan secara musyawarah dengan memperhatikan suara dari berbagai pihak, dan hal ini pula yang membedakan antar proses pengangkatan Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.140.

Affan. Karena itu Utsman bin Affan ditetapkan menjadi khalifah, pada hari Senin, akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 H. dan resmi menjadi khalifah yang ketiga dari Khulafa alrasyidin pada tanggal 1 Muharram tahun 24 H.

#### **4. Mekanisme Pengangkatan Ali bin Abi Thalib r.a**

Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Usman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Usman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Usman dan juga kaum muslimin. Khalifah Usman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 M.

Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, ingin membaiai Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Namun Ali belum mengambil tindakan apa pun. Keadaan begitu kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali pun ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan dan tindakan. Setelah terus menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibai'at menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 M, bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir, sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah. Namun sayangnya, ternyata tidak seluruh kaum muslimin membaiai Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah. Selama masa kepemimpinannya, khalifah Ali sibuk mengurus mereka yang tidak mau membaiai dirinya tersebut. Sama seperti pendahulunya yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Usman, khalifah Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang

dengan kemewahan hidup. Ia bahkan menentang mereka yang hidup bermewah-mewahan.<sup>59</sup>

#### **D. Komisi Pemilihan Umum**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan penjelasan mengenai Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah penyelenggara pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan kepala daerah di Provinsi, sedang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota ayat (8).<sup>60</sup> Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

---

<sup>59</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,..., h.151-153.

<sup>60</sup> Lihat Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.



Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilihan umum tahun 2009 dibuat pula Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Terakhir Dewan

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>61</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang dan Luber dan Jurdil. Badan-badan tersebut yaitu: (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan. (6) Pengawas Pemilu Lapangan. (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri. (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP). (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (10) Panitia pemungutan Suara (PPS). (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLSN).<sup>62</sup>

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggara pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilihan umum harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas

---

<sup>61</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), h. 16.

<sup>62</sup> Lihat Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan umum dan menghormati hak politik warga negara.<sup>63</sup>

Struktur Organisasi penyelenggara pemilihan umum terdiri atas komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota. Dalam pengertian diatas, komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun sudah dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>64</sup>

Ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap

---

<sup>63</sup> Tjahjo Kumulo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*,...,h. 186.

<sup>64</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), h. 115.

dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diketahui bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara keseluruhan dapat terlaksana apabila penyelenggara pemilihan umum mempunyai integritas dan profesional.<sup>65</sup>

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjangkauan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penelitian administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi. Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>66</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h.120 .

<sup>66</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

dilakukan oleh Septrianingsih yang berjudul “Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Dan Lampung Barat Tahun 2014”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penetapan timsel rekrutmen anggota KPU Tulang Bawang dan Lampung Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung, kemudian untuk mengetahui standar kualifikasi dan kompetensi yang digunakan KPU Provinsi Lampung dalam menetapkan timsel rekrutmen anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat, kemudian untuk mengetahui apakah kredibilitas menjadi faktor penentu dalam penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun dua jenis pengumpulan data yaitu dari metode *interview*, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penetapan timsel anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat adalah *not completely merit system* namun tidak juga dapat dikatakan *spoil system* karena penetapannya berdasarkan pada keahlian dan kompetensi calon, namun keahlian dan kompetensi tersebut bukanlah keahlian dan kompetensi dalam bidang pemilihan.

Penelitian yang kedua adalah penelitian oleh Dimas Tangguh S yang berjudul “Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat

yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan KPU Provinsi Lampung mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, test tertulis, test kesehatan, test psikologi, dan seleksi wawancara calon anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat sampai penetapan anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat oleh KPU Provinsi Lampung. Adapun jenis pengumpulan data yaitu dari metode *interview* dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Tim Seleksi maupun KPU Provinsi Lampung dalam proses rekrutmen KPUD Kabupaten Pesisir Barat antara lain kendala anggaran yang menyebabkan keterlambatan pembentukan Tim Seleksi, rendahnya partisipasi pelamar yang mendaftar untuk menjadi anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat dan kendala lokasi atau jarak yang dialami oleh Tim Seleksi.

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti berfokus kepada apakah sudah terpenuhinya prinsip profesionalisme dan prinsip akuntabilitas publik dalam seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum di KPU Provinsi Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Al-Wahidal-Najjar, *Al-Khulafaur Rasyidin*, Beirut :Dar Al Kutub-Ilmiah, 1990.
- Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami*, Dar al-Ta'lif: Mishr, 1953.
- A.Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Al Bukhari, *al Jami'ah al Shahih*, al – Mukhtashar Jilid I.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.tp.
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Cet.2, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2002.
- Ambar T Sulistiyani dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri, 2002.
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2007.
- Imam S.Tunggal dan Amin W. Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance GCG*, Jakarta: Havarindo, 2002.
- Izomiddin, M.A., *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- J Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Louis Goot Schalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugraho Notosusanto, UI Press, 1995.
- Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Muhammad bin Šālīh al-‘Ušaimīn, *Syarh Riyāḍ aš-Šālīhīn*, Riyāḍ: Dār al-Watan Linnasyr, Jil III, 1425 H.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zhada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- M. Laica Marzuki, *Dari Timur Ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2008.
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1994.
- Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015..

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Zuhdi, M. Najmuddin, *Ber Islam : Menuju Keshalehan Individual Dan Sosial*, Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2004.

## Jurnal

Ambar Purdanata,dkk., Profesionalisme KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, *Jurnal Politico Unsrat*, Vol.6 Nomor 1 Tahun 2017.

Bayuaji Budihargo, “Profesionalisme Ditinjau dari Faktor Demografis (Jenis Kelamin, Usia, dan Tingkat Pendidikan) pada Karyawan Tetap Administratif Universitas Muhammadiyah Purwokerto)”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Dimas Tangguh S, “Proses Rekrutmen Anggota KPUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.12 No.1, 2015.

Lekatompessy. J.E., Hubungan Profesionalisme dengan Konsekuensinya: Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Keinginan Berpindah: Studi Empiris di Lingkungan Akuntan Publik, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1.

Mardiasmo, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu Sarana Good Governance, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 1 No.1, 2006.

Riswhanda Imawan, Profesionalisme Bidang Politik dan Swadaya Masyarakat. Makalah yang Disajikan Pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1997, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) di Medan. Tidak Diterbitkan.

Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy, Asmak Ab. Rahman, Mohd Izani bin Mohd Zain, Pengukuhan Nilai Dan Profesionalisme Di Kalangan Penjawat Awam Ke Arah Efektif Governan Di Malaysia. *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 3, 2009.

Septrianingsih, “Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Tulang

Bawang Dan Lampung Barat Tahun 2014”, Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

### **Wawancara**

Ali Sidiq, S.Sos., M.IP. (Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 Oktober 2020.

Antoniyus, SIP. (Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 26 Oktober 2020.

Dr. Budiyo, S.H., M.H (Ketua Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 Oktober 2020.

Dr. Hertanto, M.Si. (Anggota Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 26 Oktober 2020.

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.,(Anggota Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 28 Oktober 2020.

Dr. Tuntun Sinaga, M.Hum. (Anggota Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 Oktober 2020.

Erwan Bustami, S.H., M.H. (Ketua Komisioner KPU Provinsi Lampung), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 Oktober 2020.

M. Tio Aliansyah, S.H., M.H. (Anggota Komisioner KPU Provinsi Lampung), Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 9 Oktober 2020.

### **Sumber On-Line**

Faisal Akbar Sagala, “Profesionalisme Etika Profesi” (On-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/faisalazharsagala/593ff03d599373c208d05ef6/profesionalisme-etika-profesi?page=all> (9 Maret 2020).

Nilai Suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan Sekitar Rp. 400 Juta” (On-line), tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1292866/nilai-suap-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-sekitar-rp-400-juta> (9 Maret 2020).

Prinsip” (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip> (9 Maret 2020).